



Mengendap Dana Pemda Rp 233,8 T

JAKARTA, TRIBUN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, terdapat Rp 223,84 triliun dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan hingga akhir September 2022. Nilai itu naik 10,04 persen atau Rp 20,41 triliun dibandingkan dana mengendap pemda di bank pada bulan sebelumnya yang sebesar Rp 203,42 triliun.

Juga lebih tinggi dibandingkan dengan dana pemda mengendap di bank pada September 2021 yang sebesar Rp 194,12 triliun. "Dana pemerintah daerah di bank masih sangat tinggi dan naik dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu mencapai Rp 223,84 triliun. Jadi kita lihat tren dari uang yang di perbankan masih belum menurun," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (21/10/2022).

Ia mengatakan, realisasi belanja pemda yang belum optimal membuat dana mengendap di perbankan tetap tinggi. Hingga September 2022, realisasi belanja pemda sebesar Rp 637,92 triliun atau baru mencapai 53,4 persen terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Realisasi itu naik tipis 0,1 persen dibandingkan belanja pemda pada periode sama di 2021 yang mencapai Rp 637,29 triliun. Sri Mulyani mengatakan, berdasarkan


Dana pemerintah daerah di bank masih sangat tinggi dan naik dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu mencapai Rp 223,84 triliun



Menkeu: Realisasi Belanja Belum Optimal

Sri Mulyani

Menteri Keuangan

polanya maka belanja pemda akan meningkat signifikan pada bulan Desember.

"Kalau lihat dari pola sebelumnya, bulan depan dan bulan November masih mungkin akan tinggi (dana yang mengendap), dan baru akan terealisasi di bulan Desember. Ini adalah salah satu pola belanja yang semuanya terkonsentrasi pada bulan Desember," jelas dia.

Secara rinci, berdasarkan wilayah atau provinsi, Jawa Timur masih menjadi pemda dengan saldo tertinggi yang mengendap di bank yakni mencapai Rp 29,65 triliun. Kemudian di susul DKI Jakarta dengan saldo mengendap sebesar Rp 13,52 triliun. Ia pun meminta, pemda bisa mempercepat belanja anggarannya, namun dengan tetap memperhatikan output

yang akan dihasilkan supaya manfaatnya bisa optimal dirasakan masyarakat.

"Kami berharap pemerintah daerah maupun Kementerian lembaga di pemerintah pusat bisa mengakselerasi belanjanya menjadi lebih cepat namun tetap lebih fokus, supaya dampaknya ke masyarakat bisa dirasakan," pungkas Sri Mulyani.

Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami surplus sebesar Rp 60,9 triliun pada September 2022. Capaian itu lebih rendah dari realisasi surplus APBN Agustus 2022 yang sebesar Rp 107,4 triliun.

Adapun besaran surplus APBN di Agustus 2022 tersebut setara dengan 0,33 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Realisasi itu sekaligus menjadi bulan ke sembilan berturut-turut APBN mengalami surplus. "Surplus ini lebih rendah dari bulan sebelumnya, namun situasi ini lebih baik dibandingkan September tahun lalu yang defisit Rp 451,9 triliun," ujar Sri Mulyani.

Ia menjelaskan, surplus APBN tersebut ditopang oleh pendapatan negara yang tumbuh signifikan dibandingkan belanja negara. Meski demikian, dia mengakui belanja negara masih perlu diakselerasi. **(Kompas.com)**